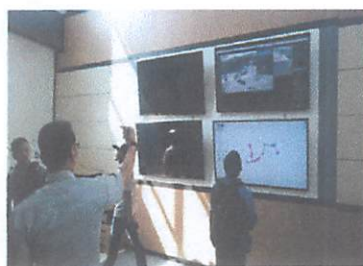


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 2018



Ringkasan Eksekutif

Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan program prioritas daerah dan isu-isu strategis bidang komunikasi dan informatika terkini, serta mengacu pada Renstra 2016-2021, dalam menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 yang merupakan implementasi dari 1 (satu) program prioritas yaitu: Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Dari hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja tersebut, semua indikator kinerja dapat mencapai target yang diharapkan

Uraian dan status capaian dari kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70.5	72.93	103.45% (tercapai)
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%	%	% (tercapai)

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2018

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.004.371.200,- atau sebesar 144,83 % dari target sebesar Rp. 693.494.400,-. Sedangkan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2018 adalah Rp. 10.650.843.500,dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.008.505.050 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,97 %, maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 642.338.450

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya semata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 (LKJIP) dapat terselesaikan tepat waktu

Disusunnya LKJIP ini merupakan Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP ini memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018. LKJIP ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Akhirnya diharapkan keterlibatan, komitmen dan upaya yang terus menerus dari semua elemen dalam organisasi ini untuk dapat mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika , '**Balikpapan Smart Government**'.

Balikpapan Pebruari 2019

Kepala Dinas



Tatang Sudirja

BAB. I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi, Bina Egovernment serta LPSE;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Eselon IV di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian tersebut tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, maka ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Walikota dengan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV. Laporan Kinerja ini disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2018, dan laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

I. 2 Landasan Hukum

1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang- undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

I. 3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, laporan ini digunakan dengan mempratekkan prinsip – prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

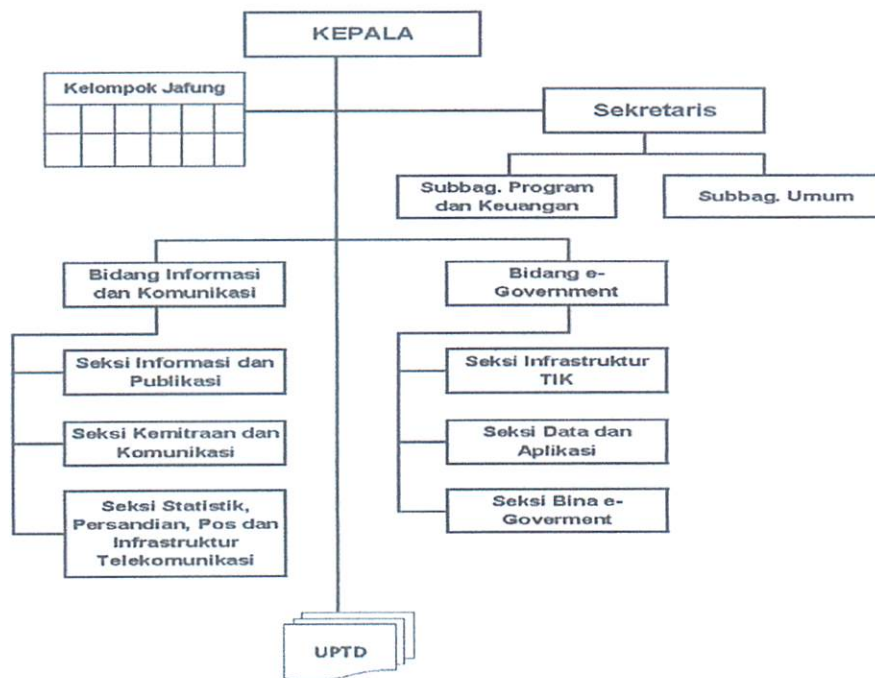
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018

I. 4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Potensi Sumber Daya

I.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas komunikasi dan informatika



Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang membawahkan
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Publikasi;

2. Seksi Kemitraan dan Komunikasi; dan
 3. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. Bidang e-Government, yang membawahkan:
1. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Data dan Aplikasi; dan
 3. Seksi Bina e-Government;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.4.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Kantor Walikota Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman No. 1 – RT 13 Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, untuk bidang e-Government dan gedung Dinas komunikasi dan Informatika Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu Balikpapan (Samping Kantor BPS) untuk bidang Infokom dan Sekretariat.

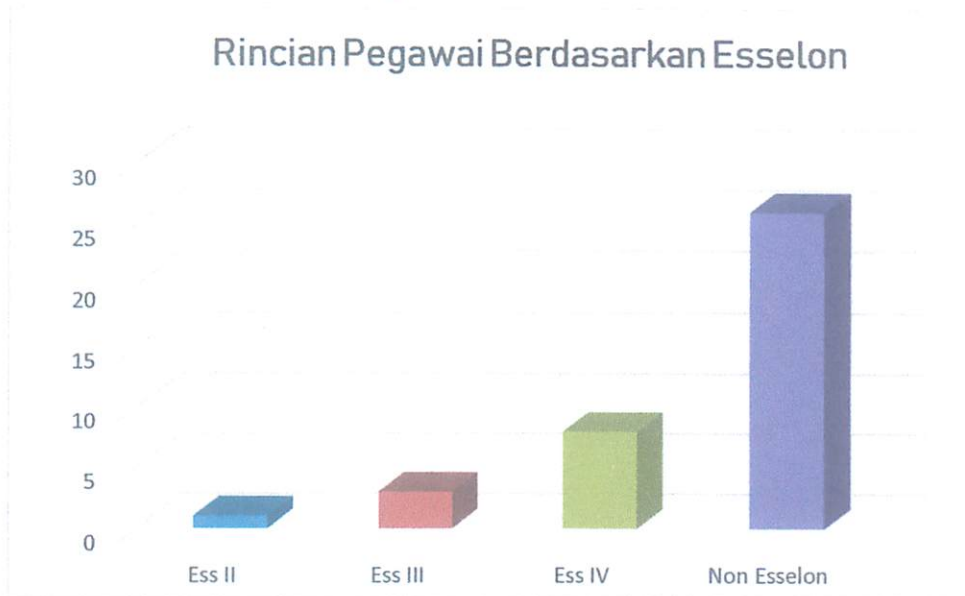
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 35 orang. Berikut rincian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan:

Tabel 1.4

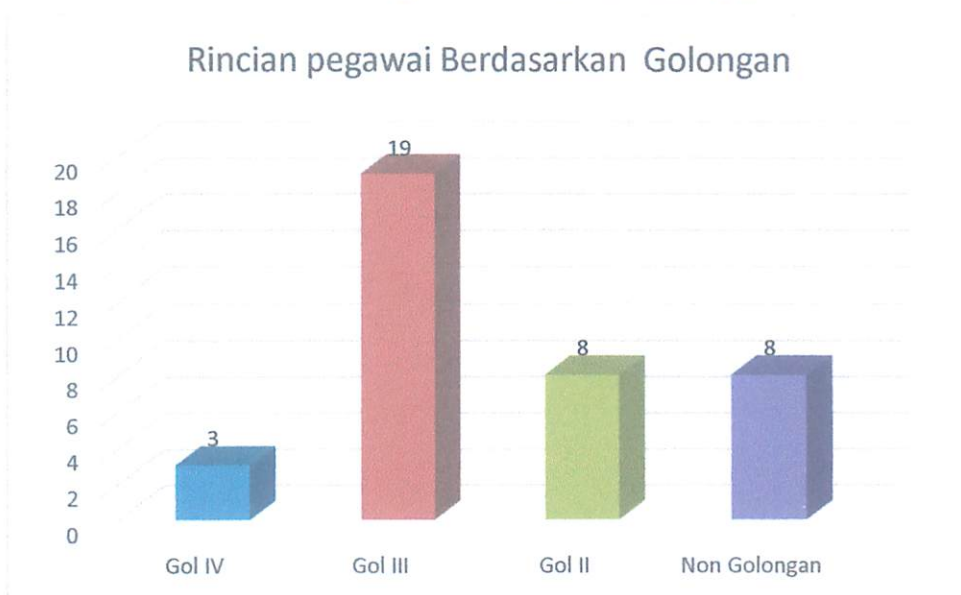
Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Naban	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	0	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	0	2	0	1	1	0	0	0	2
4	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	2	0	0	0	2
5	Kepala Seksi	0	0	6	0	6	0	0	0	6
6	Pelaksana	0	0	0	0	10	8	0	8	26
Total										38

Gambar 1.2
Rincian Pegawai Berdasarkan Esselon

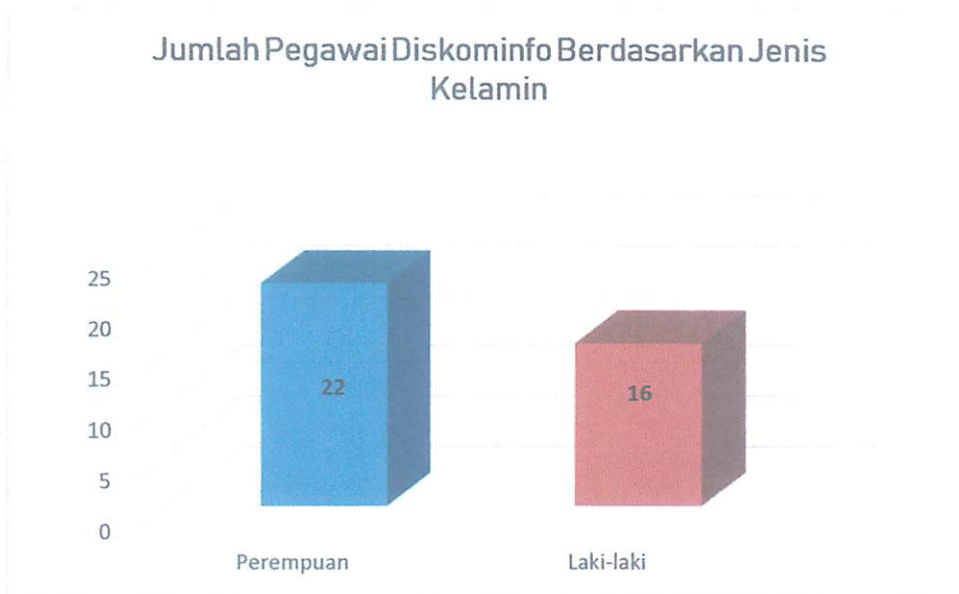


Gambar 1.3
Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1.4

Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



I. 5 Permasalahan Strategis

I.5.1 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 2 (dua) permasalahan utama yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah. Kedua permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

1. Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung Balikpapan Cyber City.

E Government adalah penggunaan teknologi oleh Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menghubungi masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan lain yang terkait. Teknologi ini dapat menghasilkan berbagai pelayanan publik dengan berbagai manfaat, penyampaian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pelaku bisnis dan dunia industri, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan akses informasi publik.

Saat ini pelaksanaan e –Government masih menghadapi permasalahan terkait perencanaan, kebijakan , kelembagaan, aplikasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, Layanan dan anggaran TIK.

Permasalahan tersebut berusaha di atasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menerbitkan cetak biru *e Government* Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebagai panduan implementasi *e-Government*. Cetak biru tersebut mengamanatkan transformasi perubahan *e-Government* menuju *Smart Governance*. Transformasi tersebut dituangkan dalam *roadmap* pengembangan *smart Governance* dengan fokus pada pengembangan sistem informasi manajemen perangkat daerah dan infrastruktur TIK terpadu, penyusunan kebijakan TIK dan integrasi data serta pengembangan layanan berbasis aplikasi *mobile* dan Sistem Informasi Eksekutif.

2. Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian keterbukaan informasi.

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi (95%), internet (33%), radio (20%), koran (12%), dan media lainnya (22%) . Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar dari mereka memiliki akses terhadap televisi dan telepon selular namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya dibutuhkan. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat.

Diharapkan dengan memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan Undang-undang no. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik kepada masyarakat ,dapat diperoleh kepuasan masyarakat dalam hal informasi pembangunan secara menyeluruh.

1.5.2 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Statistik

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang urusan adalah adalah:

1. Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria

antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Saat ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia kegiatan statistik hanya dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan data statistik sektoral saja yang ada di beberapa perangkat daerah. Untuk itu tahun 2019 – 2020 perlu segera disusun tata kelola satu data statistik sektoral sehingga pengumpulan dan penyebaran data/informasi dapat berjalan dengan baik.

I.5.3 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Persandian

Dalam Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, tidak terdapat permasalahan strategis dikarenakan pada tahun 2016 penyelenggaraan kegiatan persandian masih dilaksanakan pada tataran kirim terima berita melalui mail.sanapati.net yang dilaksanakan pada bagian umum setdakot Balikpapan. Sedangkan pada Tahun 2017 telah berdiri Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan dalam urusan Persandian. Saat ini penyelenggaraan kegiatan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada pengamanan informasi. Pengamanan informasi harus mampu memberikan pengamanan terhadap penggunaan teknologi terkini dan masa mendatang. Agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun kebijakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi. Namun, saat ini tata kelola tersebut belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia pada seksi persandian dan urgensi kegiatan pengamanan informasi yang harus terlebih dahulu dilaksanakan, sehingga pada tahun 2019 – 2020 akan menjadi prioritas urusan persandian dalam menyusun tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.

I.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB 4 PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2018 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Indikator Kinerja Utama

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 sampai dengan 2021

Penyusunan Renstra 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan masalah strategis yang ada di Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Balikpapan yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam Renstra Dinas Komunikasi dan informatika.

Pemerintah Kota Balikpapan Dalam konteks ini Dinas Komunikasi dan informatika merumuskan visi

“ Mewujudkan Balikpapan Smart Governance”

Smart Governance adalah gambaran pelayanan publik masa kini yang berorientasi pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, tidak terbatas ruang dan mengedepankan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. **Smart governance** dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa *smart* pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. **Smart governance** memanfaatkan teknologi Informasi Komunikasi yang ada untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.. Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memformulasikan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Membangun Keterbukaan Informasi
 2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan *e Government* melalui *e Governance*
- Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Tabel 2.1 Kesesuaian Renstra dengan RPJMD

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
Visi	Mewujudkan Balikpapan Kota Terkemuka, Nyaman dihuni , dan Berkelanjutan menuju Madinatul iman	Mewujudkan Balikpapan Smart Governance
Misi	Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik 2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance
Tujuan	Tujuan 8. Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK
Sasaran	Sasaran 10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik. 2. Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat
Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi 3. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional informasi melalui: Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi para stakeholders terkait implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota melalui: menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media 2. Menyediakan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e government melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan e-government (tata kelola, regulasi)

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pembangunan aplikasi • Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (jaringan, perangkat keras)
Program Pembangunan Daerah	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Prioritas	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD
Program Pendukung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi dengan indikator persentase cakupan pengawasan infrastruktur telekomunikasi 2. Program kerjasama Informasi dan Media Massa (tahun 2017- 2021) dengan indikator Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 3. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat (2018-2021) dengan indikator Presentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat. 4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indicator Persentase Publikasi data dan statistik daerah 5. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir periode perencanaan (tahun 2021).

Penentuan besaran sasaran strategis ditetapkan berdasarkan harapan *stakeholders*, kondisi internal maupun eksternal penetapan besaran strategis dihasilkan dari rapat koordinasi jajaran eselon II,III dan IV dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan ,sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	65,5	70,5	73,5	77,5	81,25
	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84%	91%	95%	98%	100%

Sasaran Strategis diatas akan dicapai melalui 5 program .Adapun ke 5 Program tersebut adalah:

1. Program Pengawasan, pengendalian, Pembinaan telekomunikasi dan teknologi Informasi
2. Program Kerjasama informasi dan Media Masa
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

GAMBAR 2.2 Program Prioritas dan program Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika

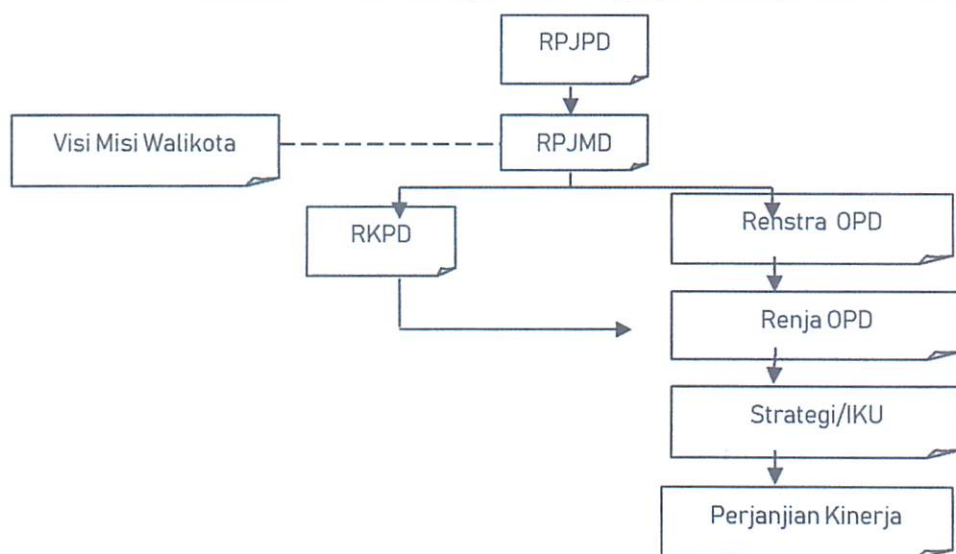


II.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Gambar 2.2 Alur Penyusunan Perjanjian Kinerja Diskominfo



Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diuraikan seperti pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik.	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	70.5
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diimplementasikan melalui 1 (satu) program prioritas dan 3(tiga) program pendukung seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Program Prioritas)
Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan teknologi informasi Komunikasi sebagai pendukung penerapan e government dalam rangka pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat Kota Balikpapan. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut;
 1. Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 2. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government
 3. Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 4. Sewa Bandwidth Internet
 5. Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer
 6. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi

2. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi (Program Pendukung)
Tujuan dari program ini adalah untuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi agar pelayanan publik terkait dapat dilaksanakan secara maksimal Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut;
 1. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi

3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa (Program Pendukung)
Tujuan dari program ini adalah menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan agar masyarakat memiliki informasi yang berimbang tentang Pemerintah Kota Balikpapan mengingat banyak terjadi hoax saat ini. Program Ini juga merupakan perwujudan peran Dinas Komunikasi dan informatika sebagai GPR. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut
 1. Diseminasi Informasi Daerah
 2. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa

4. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat Kota Balikpapan
Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut
 1. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi

5. Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

Tujuan program ini adalah upaya pemerintah kota balikpapan dalam melindungi informasi publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan;

1. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tingkat capaian kinerja sasaran dalam hal ini diukur dengan menggunakan standar pengukuran ordinal

$$\text{CAPAIAN IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Standar pengukuran ordinal

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Sangat Baik
3	70-84	Baik
2	55-69	Cukup Baik
1	Kurang dari 55	Kurang

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis. Adapun kedua sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2018
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Nilai Kepuasan Masyarakat	70.5
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.910.967.500	APBD MURNI
Penyebarluasan Informasi Daerah	917.000.000	APBD MURNI
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	243.588.000	APBD MURNI
Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	141.200.000	APBD MURNI

III.1.1 . PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2018 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Misi I				
Membangun Keterbukaan Informasi				
Tujuan				
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK				
Sasaran				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70.5	72.93	103.45 % (tercapai)
Misi II				
Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance				
Tujuan				
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK				
Sasaran				
Meningkatnya penyelenggaraan (SPBE) atau e government dlm meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah thd masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91 %	108,93%	119,6% (tercapai)

Sebagai institusi yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha mengembangkan pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi publik di Pemerintah Kota Balikpapan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, program dan kegiatan tersebut ditetapkan dengan indikator Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

1. Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik terdapat indikator sasaran **skor hasil nilai indeks kepuasan masyarakat** yang pada awal tahun 2018 memiliki target 70.5 kemudian realisasi skor yang tercapai di Tahun 2018 memiliki skor 72.93 (baik) sehingga capaian kinerja 103.45%. Dalam survei ini jumlah sampel yang ditetapkan sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 7 responden. Populasi responden dalam survei ini adalah para pengguna layanan informasi publik yang melakukan permohonan informasi publik pada tahun 2018. Jumlah populasi ditetapkan berdasarkan jumlah pengguna layanan adalah sebanyak 7 pengguna layanan.

a. Adapun skor rata-rata unsur hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan Publik x 25

Untuk Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan digambarkan dalam tabel berikut ini.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Teknik analisis data dalam pelaksanaan SKM layanan informasi publik Tahun 2018 adalah dengan menggunakan Analisa Univariat. Analisa ini bertujuan untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan) hasil temuan tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik tahun 2018 menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi publik tahun 2018 yang dilaksanakan Diskominfo berada pada kategori Baik dengan nilai IKM sebesar 72,93.

Baiknya mutu layanan informasi publik tahun 2018 ditunjang oleh tingginya nilai rata-rata 5 dari 6 unsur tertimbang, yaitu kemudahan persyaratan, ketepatan waktu, kemampuan petugas, perilaku petugas, dan kualitas sarana dan prasarana.

Tabel 3.3
Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan
SKM Layanan Informasi Publik Diskominfo Pada Tahun 2018

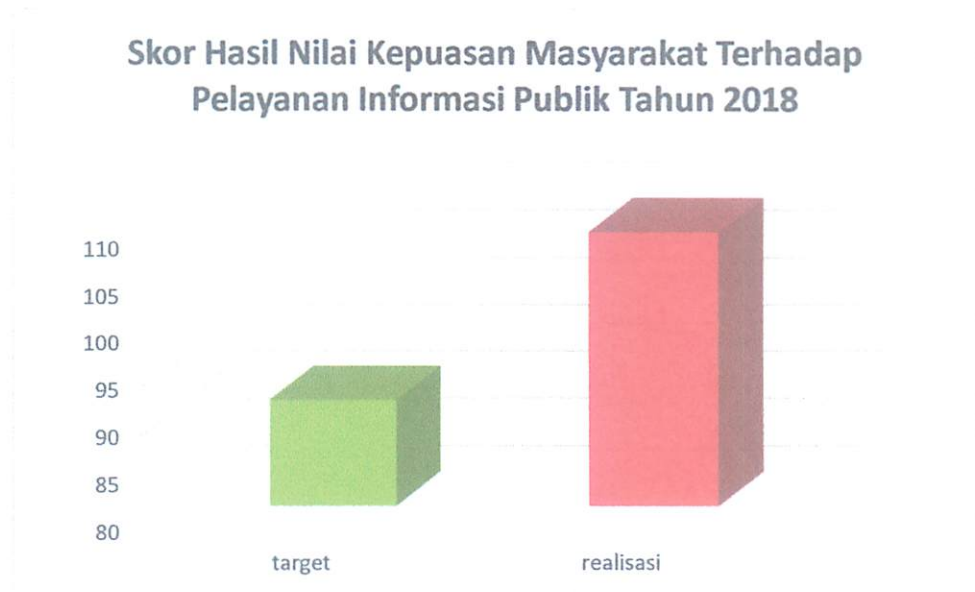
No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Kemudahan persyaratan	3,250
2.	Kemudahan prosedur	2,250
3.	Ketepatan waktu	2,750
4.	Kemampuan petugas	3,00
5.	Perilaku petugas	3,500
6.	Kualitas sarana dan prasarana	2,750

Berdasarkan tabel diatas, unsur tertinggi dalam penilaian berada pada unsur perilaku petugas dengan nilai 3,500. Tingginya unsur ini menjadi acuan Diskominfo untuk mempertahankan nilai ini dengan selalu memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana layanan informasi publik. Sedangkan unsur terendah dalam penilaian ini berada pada unsur kemudahan prosedur dengan nilai 2,250 atau dengan kriteria kurang baik.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian terhadap hasil SKM layanan informasi publik tahun 2018 adalah rendahnya nilai pada unsur kemudahan prosedur pelayanan. Padahal dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Diskominfo melaksanakannya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional. Adapun standar layanan yang digunakan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam standar pelayanan tersebut diuraikan prosedur pelayanan informasi yang harus dilakukan oleh badan publik, seperti mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dan menyerahkan salinan identitas diri yang menyatakan bahwa pemohon informasi berkewarganegaraan Indonesia. Atas dasar itulah Diskominfo belum dapat melakukan perubahan standar pelayanan khususnya pada prosedur pelayanan sebelum adanya perubahan standar layanan informasi publik yang ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan perhitungan nilai IKM Layanan Informasi Publik Tahun 2018, maka saran yang dapat diberikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan informasi publik adalah dengan mempertahankan capaian nilai rata-rata per unsur pelayanan yang telah bernilai sangat baik dengan meningkatkan kualitas SDM pada layanan informasi publik.

Gambar 3.1 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Skor hasil nilai kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Informasi Publik



- Pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau *e government* dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat terdapat indikator sasaran **Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah**. Target sasaran ke 2 (dua) pada awal tahun disusun sebesar 91%, kemudian di akhir tahun 2018 Realisasi indikator kinerja yang diperoleh sebesar 108,93 % dan mendapat capaian sebesar 119,6 % dari target yang telah ditentukan. Sasaran ke -2 dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan SPBE atau *e government* pada perangkat daerah memiliki formulasi jumlah aplikasi yang dimanfaatkan berbanding dengan jumlah aplikasi yang ada pada Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah Aplikasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 56 Aplikasi. Dan di tahun 2018, terealisasi 61 aplikasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun daftar aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tabel daftar Aplikasi yang diinginkan dan daftar aplikasi yang tersedia

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi	2017		2018		Aplikasi yang diinginkan	
1	BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur	1	e-presensi					1 Integrasi dengan-SIAK, SIPKD	
			2	tamisu						
			3	KGB						
							1	Baperjakat		
2	BPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1	SIPKD			1	Integrasi e-Planning	1 Integrasi e-Planning	
			2	SIMDA						
3	BPPDRD	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	SIMPAD						
			2	SISMIOP						
							1	Vtax PBB		
							1	Vtax SIG		
							1	Mobile POS		
							1	META BASE		
4	BAPPE DA	Badan Perencanaan, Penelitian	1	Sistem Informasi Data Spasial						

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi	2017		2018		Aplikasi yang diinginkan	
		n dan Pengembangan Daerah								
					1	e-Planning				
					2	Databas e Pembangunan				
							1	SIPEKA		
							1	e-LKPJ		
5	DISDU KCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)						
			2	KTP-elektronik						
			3	Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan (Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat)						
			4	Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan (SIMYANKEL) - Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat						
6	DINKES	Dinas Kesehatan	1	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)			1	Antrian Online RSUD	1	Pendaftaran Online untuk RSUD dan RSKB

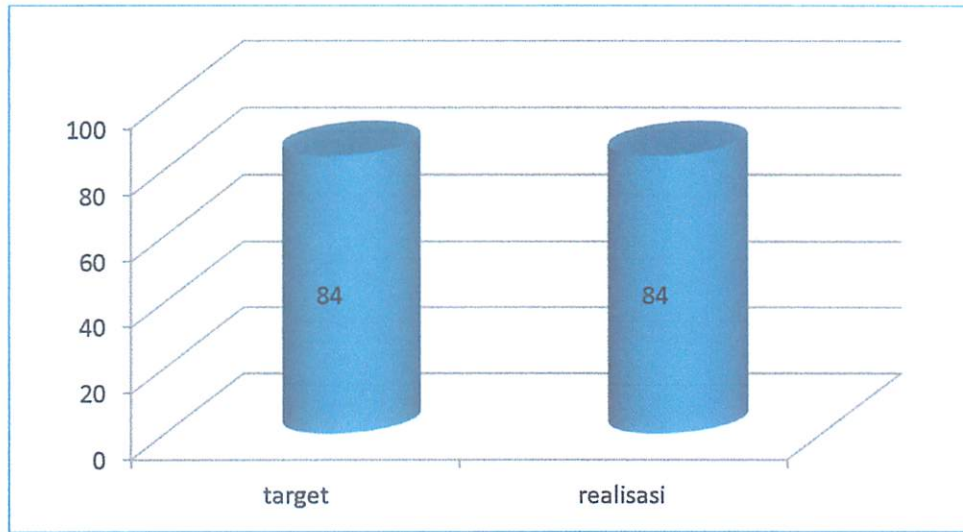
No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi	2017		2018		Aplikasi yang diinginkan	
			2	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD)						
7	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	E-kinerja	1	Beasiswa				
					1	Integrasi SIMPAD				
					1	SiTanggap				
					1	e-Office				
							1	e-LHP		
8	DISKOP	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			1	SIM Data Industri				
9	DP3	Dinas Pekejaan Umum					1	Data Informasi Pangan Pertanian dan Perikanan (DIPANGAN)	1	SINelayan
10	DIPORAPAR	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	SIDIA (Sistem Informasi Data Induk Atlet)	1	Antrian Online				

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi	2017		2018		Aplikasi yang diinginkan
1 1	DPMPT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1	Sistem Informasi Cerdas Layanan Untuk Publik (SiCantik)					
			2	Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP)					
1 2	DISDIK BUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	SiDalah (Sistem Informasi Data Sekolah) http://sidalah.balikipapan.go.id/					
			2	PPDB Online (https://balikipapan.siapppdb.com/)					
1 3	DISHUB	Dinas Perhubungan	1	SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor)	1	TMC Kota Balikpapan			
			2	SIMAU (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum)					
1 4	DISPUSAR	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	MySipisis	1	iBalikpapan (perpustakaan digital mobile apps untuk masyarakat)			

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi	2017		2018		Aplikasi yang diinginkan	
					2	Educati on Tube (Edu Tube) video pembel ajaran - off line				
							0	inlislite		
							1	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)		
15	DPPR	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		1	SIM IMTN (Pelayanan Ijin Mengolah Tanah Negara)					
16	DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja		1	Sistem Informasi Tenaga Kerja (Pendataan Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan)	1	SIM Hubungan Industrial	1	SISKA	
										1 integrasi Peirzinan
17	Inspektorat	RSKB Sayang Ibu								1 e-LHP
18	SETDA	Sekretariat Daerah		1	SIM Bansos					1 SIM PBJ
				2	JDIH					2 Agenda Online
				3	Informasi Coffee Morning (ICON)					

No	OPD	Jumlah	Nama Aplikasi	2017	2018	Aplikasi yang diinginkan
		4	Penggajian			
		5	SPPD			
		6	Kendaraan Dinas			
		7	SIMONTeppa			
		8				
					1	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIMPRA)
19	DISDA G	1	SIM Pasar			
		35		11	2	8
	Total Aplikasi	54			14	
	Yang diinginkan	19				

Gambar 3.2
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Pemanfaatan SPBE atau e government pada Pemerintah Kota Balikpapan



Hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya SDM bidang TIK dalam pelaksanaan pengintegrasian sistem aplikasi. Oleh karena itu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan merekrut tenaga ahli dibidang TIK (Progammer) diluar ASN dan melakukan *transfer knowledge* kepada SDM TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

III.1.2. REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2018 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I
Terjadi penurunan nilai realisasi sasaran I pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 78.93 menjadi 72.93. Meskipun penurunan nilai realisasi terjadi, namun realisasi tahun ini masih diatas target kinerja tahun 2018.
- b. Sasaran II
Terjadi kenaikan angka realisasi sasaran II jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari realisasi 84 % menjadi 108,93%

INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2018	Realisasi	
		Tahun 2018	Tahun 2017
Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70,05	72,93	78,93
Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%	108,93	84%

III.1.3 REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN DENGAN TARGET AKHIR PERENCANAAN STRATEGIS DISKOMINFO

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2018 dengan target akhir Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70,05	72,93	104,11%	81,25	89,76%
Meningkatnya penyelenggaraan (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%	108,93	119,6 %	100%	91,80%

III.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 disajikan sebagai berikut;

- a. Sasaran I
Pengukuran capaian realisasi dari sasaran I, yaitu 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik', saat ini menggunakan indikator 'Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat'. Berdasarkan perbandingan angka realisasi tahun ini dengan tahun

sebelumnya telah terjadi penurunan nilai realisasi. Penurunan nilai ini tidak serta merta menggambarkan telah terjadi penurunan kinerja. Penurunan nilai realisasi tersebut dikarenakan adanya perbedaan layanan informasi publik yang di survey. Pada tahun 2017, survey dilakukan terhadap pelayanan informasi aduan masyarakat lalu pada tahun 2018, survey dilakukan terhadap pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID). Perubahan objek yang disurvey tanpa merubah indikator kinerja sasaran dalam Renstra Diskominfo ini dilakukan karena PPID lebih tepat menggambarkan kualitas pelayanan informasi publik atau lebih luas jika dibandingkan dengan informasi pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Perbedaan objek survey juga membuat terjadinya perubahan metodologi pengambilan sampel dan juga metodologi penilaian hasil survey. Turunnya angka realisasi dari 78.93 menjadi 72,93 atau penurunan 7,6 % tidak membuat capaian sasaran ini menjadi dibawah 100%. Capaian tetap diatas 100 % yaitu 104,1 % karena nilai ini masih diatas target kinerja 2018 sebesar 70.05. Kedepannya diharapkan hasil nilai survey akan terus meningkat bersamaan dengan ditingkatkannya kinerja dan peningkatan kompetensi SDM Diskominfo.

b. Sasaran II

Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ke-2, yaitu 'Meningkatnya Penyelenggaraan (SPBE) Atau E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Terhadap Masyarakat', saat ini menggunakan indikator 'Persentase Pemanfaatan SPBE Atau E Government Pada Perangkat Daerah' dimana yang diukur adalah banyaknya jumlah aplikasi yang berhasil dikembangkan pada tiap tahun berjalan. Pada tahun 2018 capaian realisasi sasaran telah mencapai 108,93% dimana sudah melebihi target capaian sebesar 119,6 %. Faktor utama dari melebihinya realisasi capaian adalah karena sistem pengelolaan TIK, dalam hal ini *e-governance*, masih bersifat terdistribusi dimana masing-masing Perangkat Daerah masih bisa menganggarkan pembuatan dan pengelolaan aplikasi sendiri. Faktor kedua adalah pengembangan aplikasi di masing-masing Perangkat Daerah masih belum mengikuti *blueprint* aplikasi *e-government*. Kedua faktor di atas menyebabkan kegiatan pengembangan aplikasi di tiap Perangkat Daerah menjadi tidak terarah dan tidak dapat dikontrol oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri di awal tahun 2018 dan 2019 telah menyebarkan formulir daftar aplikasi dan rencana pengembangan aplikasi di tahun berjalan, namun tidak setiap Perangkat Daerah memberikan data yang diinginkan. Hal ini

menyebabkan kegiatan monitoring aplikasi menjadi sulit dan evaluasi antara capaian dengan rencana pengembangan aplikasi di tahun berjalan menjadi tidak tepat.

III.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Berdasarkan pagu definitif TA 2018, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 10.650.843.500.dengan realisasi mencapai Rp.10.008.505.050 atau 93,97 %.

Tabel 3.5
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan informasi Publik	70,05	72,93	104,11	Program pengembangan ,Informasi dan Media Massa	278.488.000	231.381.163	83,08	88,0	16,10
						Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	164.953.000	128.179.633	77,71		
						Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota	113.535.000	103.201.530	90,08		
						Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.110.000.000	1.021.401.945	92,02		
						Diseminasi Informasi Daerah	417.000.000	378.939.396	90,87		
						Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	693.000.000	642.462.549	92,71		
						Program Pelayanan pengaduan Masyarakat	137.300.000	119.180.488	86,80		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	137.300.000	119.180.488	86,80		
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.148.000	685.144.718	93,71		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	534.000	53,40		
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.500.000	2.001.200	13,80		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000	43.695.000	91,03		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	67.700.000	96,71		
						Penyediaan Makanan dan Minuman	64.500.000	54.388.000	84,32		
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	286.590.000	282.684.660	98,64		
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	246.558.000	234.141.858	94,96		
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	306.900.000	259.056.020	84,41		
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	220.900.000	185.814.000	84,12		
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	80.000.000	69.612.020	87,02		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000	3.630.000	60,50		
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%	108,93 %	119,1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.810.227.500	3.591.670.131	94,26	94,26	24,84
						Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	327.500.000	305.112.498	93,16		
						Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	321.930.000	265.355.758	82,43		
						Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	650.000.000	596.841.550	91,82		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Sewa Bandwidth Internet	2.000.000.000	1.955.250.000	97,76		
						Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	120.200.000	108.572.198	90,33		
						Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	390.597.500	360.538.127	92,30		
Rata-rata Capaian Kinerja					52,06						
Total Belanja Langsung							6.374.063.500	5.907.834.465		91,13	
Rata-rata Capaian Anggaran									92,69		20,47

Dibandingkan dengan kinerja pada capaian tahun 2018 maka realisasi anggaran sebesar 92,69% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 119,60% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana sebesar 20,47%

III.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Komunikasi and Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2018 (setelah perubahan), maka realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Menara telekomunikasi	693.494.400	1.004.371.200	144,83%
Belanja	10.650.843.500	10.008.505.050	93,97%

Total Target Pendapatan Retribusi daerah adalah sebesar Rp 693.494.400 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.004.371.200 sedangkan total anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebesar Rp.10.650.843.500 dan realisasi anggarannya mencapai Rp 10.008.505.050 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93.97%, maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 642.338.450 ,hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebesar Rp 11.760.509.800 terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.276780.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.100.670.585 (95,88%).
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.374.063.500 dengan realisasi sebesar Rp .5.907.834.465 (92.68%) yang terbagi atas :

- 1) Anggaran pelaksanaan 4 (empat) program yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran I sebesar Rp. 2.563.836.000, dengan realisasi sebesar Rp 944.200.738,00 atau 90;
- 2) Anggaran pelaksanaan 1 (satu) program yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran II sebesar Rp 3.810.2227.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.591.670.131 atau 94,26 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.6

Tabel perbandingan target dan realisasi APBD TA.2018 Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan informasi Publik	70,05	72,93	104,11	Jumlah Indikator I	2.563.836.000	2.316.164.334	90,34%
						Program pengembangan ,Informasi dan Media Massa	278.488.000	231.381.163	83,08
						Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	164.953.000	128.179.633	77,71
						Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota	113.535.000	103.201.530	
						Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.110.000.000	1.021.401.945	92,02
						Diseminasi Informasi Daerah	417.000.000	378.939.396	90,87
						Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	693.000.000	642.462.549	92,71
						Program Pelayanan pengaduan Masyarakat	137.300.000	119.180.488	86,80
						Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	137.300.000	119.180.488	86,80
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.148.000	685.144.718	93,71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	534.000	53,40
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.500.000	2.001.200	13,80
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000	43.695.000	91,03
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	67.700.000	96,71
						Penyediaan Makanan dan Minuman	64.500.000	54.388.000	84,32
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	286.590.000	282.684.660	98,64
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	246.558.000	234.141.858	94,96
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	306.900.000	259.056.020	84,41
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	220.900.000	185.814.000	84,12
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	80.000.000	69.612.020	87,02
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000	3.630.000	60,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	91%			Jumlah Indikator II	3.810.227.500	3.591.670.131	94,26%
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.810.227.500	3.591.670.131	94,26
						Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	327.500.000	305.112.498	93,16
						Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	321.930.000	265.355.758	82,43
						Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	650.000.000	596.841.550	91,82
						Sewa Bandwidth Internet	2.000.000.000	1.955.250.000	97,76
						Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	120.200.000	108.572.198	90,33
						Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	390.597.500	360.538.127	92,30
Total Belanja Langsung							6.374.063.500	5.907.834.465	92,69%

III.3 Capaian Prestasi dan penghargaan

Selama tahun 2018, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 2 penghargaan dari lembaga pemerintah. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.7

Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim
2	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016-2021.. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2018 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan
4. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Balikpapan
5. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang informasi komunikasi dan publikasi
6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya, Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, dan berkelanjutan menuju madinatul iman

Balikpapan, Februari 2019

Kepala Dinas



Tatang Sudirja